



Integritas Yogya Tinggi, Semarang Terendah

JAKARTA – Integritas Pemerintah Kota Yogyakarta tercatat tertinggi versi survei dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2011 ini. Namun prestasi ini berbanding terbalik dengan raihan Pemerintah Kota Semarang yang justru di posisi terbawah. Masih banyaknya praktik suap, lemahnya pemberantasan korupsi dan birokrasi yang kurang sehat menjadi penopang Pemkot Semarang di posisi terendah.

Wakil Ketua KPK M Jasim mengungkapkan, secara nasional masih terdapat 43% instansi pemerintah daerah (pemda) yang nilai integritasnya di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan hasil survei, rata-rata nilai indeks integritas nasional 6,31. Sedangkan nilai integritas instansi di daerah 6,00. Untuk rata-rata nilai integritas di

instansi pusat mencapai 7,07 dan instansi vertikal 6,40. Tahun ini KPK melakukan survei terhadap 89 instansi negara di Indonesia. Hasilnya, secara nasional rata-rata nilai integritas instansi pusat lebih tinggi dibanding pemda.

Menurut dia, terdapat 28 instansi/pemda dari 87 instansi yang nilainya di bawah standar yang ditetapkan KPK. Dari 10 nilai integritas tertinggi, 6 di antaranya diperoleh pemda, 3 instansi pusat dan, 1 instansi vertikal. "Hanya saja, pada 10 nilai integritas terendah, seluruhnya diperoleh pemda. Jadi, kalau nilainya di bawah angka 6,00, itu artinya masih ada praktik-praktik suap," tegas Jasim saat mengumumkan hasil survei integritas sektor publik 2011 di Kantor KPK, Jakarta, kemarin.

(Ke Hal 7)

Ke Hal 1

Untuk pemda dengan integritas tertinggi diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Dumai disusul Bukit Tinggi, Bitung, Yogyakarta, Batam, Pontianak, Gorontalo, Solo, Banjarbaru, dan Surabaya.

Sementara selain Semarang, sembilan pemda dengan nilai integritas terendah dimiliki oleh Pemkot Lubuk Linggau, Bogor, Palembang, Bengkulu, Depok, Serang, Manokwari, Ternate, dan Metro Lampung.

Pegiat LSM Pattiro Semarang, Ariyanto Nugroho menilai, rendahnya integritas instansi pelayanan publik di Kota Semarang menunjukkan kondisi realitas di lapangan. Pasalnya, berdasarkan pengamatan Pattiro yang dilakukan selama setahun ini, banyak pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kependudukan masih dikeluhkan oleh masyarakat. "Buktinya masih banyak pungli di sekolah yang ditemukan, proses layanan Jamskesmas juga masih dipersulit," kata Ariyanto. Menurutnya, munculnya kasus suap yang terjadi di Kota Semarang akhir-akhir ini juga merupakan potret buram Kota ATLAS ini.

Salah satu instansi yang bertugas melakukan pelayanan publik, yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang, Tata Pradana mengaku, selama setahun ini pihaknya juga sudah melakukan perbaikan demi perbaikan untuk kualitas pelayanan publik dalam hal kependudukan.

"Tahun lalu kita membuka layanan di lantai II, anjuran KPK untuk membuka semua layanan di *front office* atau lantai I sudah kami lakukan, semua pembayaran sudah melalui kasir," katanya.

Kemenag Terendah

Adapun untuk instansi pusat dengan indeks integritas tertinggi diraih Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selanjutnya disusul Kementerian Kesehatan, PT Jamsostek, Kementerian Perindustrian, PT Pelindo, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. Sedangkan yang terendah adalah Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Agama.

Jasim menjelaskan, indikator yang dinilai dalam survei tersebut di antaranya pengalaman korupsi, cara pandang terhadap korupsi, lingkungan kerja, sistem administrasi perilaku individu, dan pencegahan korupsi. Jasim menyatakan, survei ini bertujuan untuk mengetahui nilai integritas, indikator, dan subindikator integritas dalam pelayanan publik.

● nurulhuda/neneng zubaidah/amin fauzi

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005